

## **JAWABAN TUGAS 2**

Rhiza S. Sadjad  
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kode>Nama MK : **SOSI4307.7/Masalah-Masalah Sosial 7**  
Tugas : 2

### Pertanyaan 1/3:

*Jelaskan mekanisme penanganan masalah sosial.*

### Jawaban 1/3:

Menurut (Ref. [1] Modul 03, hal. 3.2 – 3.33) masalah sosial dapat ditangani melalui mekanisme dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *perspektif individual*, *perspektif struktural* dan *perspektif sistemik*. Masalah sosial dapat dikenali, atau diidentifikasi, melalui ketiga perspektif ini. Dalam penanganan masalah sosial, langkah paling awal dari mekanismenya adalah identifikasi masalah melalui ketiga perspektif tersebut (Ref. [2 (a)], [2 (b)] dan [2 (c)]). Sebagai contoh, misalnya issue kekerasan seksual kepada perempuan. Dalam perspektif individu, masalah ini dilihat sebagai masalah privat. Tapi kemudian gerakan feminisme dan LSM yang terkait mengemukakannya dalam perspektif sistemik-struktural, sehingga menjadi issue pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Langkah selanjutnya dalam mekanisme penanganan masalah sosial adalah pelibatan komunitas terkait dan inisiasi. Contohnya dalam mencari solusi dari masalah-masalah sosial yang ada di kawasan kumuh (*slum*), masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tersebut harus dilibatkan sejak langkah awal ketika dilakukan identifikasi masalah. Dalam penanganan masalah selanjutnya harus ada yang meng-inisiasi, idealnya dari kalangan warga masyarakat sendiri. Tapi biasanya sulit mengharapkan inisiasi dari masyarakat yang sedang bermasalah. Inisiator bisa dari pemerintah, atau pihak ketiga, misalnya dari kalangan LSM. Jadi mekanisme penanganan masalah sosial bisa bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) yaitu dari inisiasi oleh masyarakat yang mendapatkan masalah, atau bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) yaitu yang berupa intervensi atau “*cawe-cawe*” institusional, baik dari pemerintah, atau pihak lain. Baik mekanisme penanganan masalah sosial dari bawah ke atas, mau pun dari atas ke bawah, selalu harus memperhatikan regulasi yang berlaku, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan berbagai aturan dan norma, serta etika, sehingga penanganan masalah sosial tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru.

Mekanisme penanganan masalah sosial juga syogyanya melibatkan lembaga-lembaga profesional terkait, misalnya lembaga kajian, lembaga penelitian dan perguruan tinggi setempat. Misalnya dalam mekanisme penanganan masalah kawasan kumuh di perkotaan, seyogyanya harus melibatkan para ahli perencanaan wilayah perkotaan, sehingga jika dalam penyelesaiannya nanti

ada relokasi, maka lokasi yang baru tidak menjadi kawasan kumuh yang baru, yaitu hanya memindahkan kekumuhan dari satu tempat ke tempat lain. Ahli perencanaan wilayah perkotaan tentunya memahami wilayah kota mana yang harus dikembangkan untuk mengatasi masalah kekumuhan yang terjadi di salah satu sudut kota.

Setelah suatu masalah sosial berhasil ditangani, maka selanjutnya harus tetap dilakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi supaya penyelesaiannya masalahnya “*sustainable*” atau berkesinambungan dan berkelanjutan. Idealnya, penyelesaian masalah sosial itu bisa menjadi bagian dari gerakan reformasi di masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Pertanyaan 2/3:

*Jelaskan perbedaan pendekatan masalah sosial.*

Jawaban 2/3:

Dalam (Ref. [1] Modul 05, hal. 5.5– 5.13) diuraikan berbagai macam pendekatan dalam melihat suatu masalah sosial, yaitu dari pendekatan agama, hukum, jurnalistik, seni, ekologi, pertumbuhan eksponensial dan pendekatan interdisipiner-multidisipliner. Berbagai pendekatan ini menimbulkan berbagai perbedaan dalam melakukan pendekatan masalah sosial, yaitu perbedaan landasan teori yang digunakan, tujuan pendekatan masalah dan metode yang digunakan dalam mencari solusi-solusi alternatifnya. Pendekatan masalah yang berbeda-beda ini akan membantu dalam men-definisikan permasalahan, menentukan siapa yang bertanggung-jawab untuk menyelesaikan permasalahan, dan mencari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang memungkinkan untuk diterapkan (Ref. [2 (d)]).

Sebagai contoh misalnya perbedaan antara pendekatan dari perspektif individual dengan pendekatan dari perspektif sistemik-struktural. Pendekatan individual memusatkan perhatian pada perilaku, pilihan atau cara berfikir individu dalam melihat suatu masalah sosial, sedangkan pendekatan sistemik-struktural lebih memperhatikan struktur sosial dan kelembagaan, sehingga untuk solusinya akan mencoba melakukan perubahan perundang-undangan, reformasi kelembagaan, memperbaiki alokasi sumber-daya dan memprotes ketidak-adilan. Pendekatan sistemik-struktural umumnya melihat masalah sosial dari sisi politik, dan memerlukan upaya yang lebih sulit dan lebih lama untuk melakukan perubahan.

Contoh yang lain adalah perbedaan antara pendekatan struktural-fungsionalisme dan pendekatan partisipatoris berbasis komunitas. Pendekatan struktural-fungsionalisme melihat masalah sosial sebagai akibat dari tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial dalam mengelola keseimbangan dan kestabilan kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan struktural-fungsionalisme,

yang dituntut adalah perubahan, penyesuaian dan restorasi kelembagaan sebagai solusi dari masalah-masalah sosial. Sedangkan pendekatan partisipatoris berbasis komunitas, lebih cenderung mencari solusi bersama masyarakat secara langsung, tanpa tergantung pada lembaga-lembaga resmi yang ada.

Perbedaan lain dari pendekatan dalam melihat suatu masalah sosial contohnya adalah antara pendekatan definisi sosial dengan pendekatan konflik. Pendekatan definisi sosial melihat suatu masalah sosial dibangun oleh persepsi masyarakat yang melihatnya sebagai suatu masalah. Oleh karena itu masalah sosial dapat diselesaikan dengan mengubah cara berfikir masyarakat dalam menafsirkan suatu fenomena yang terjadi, sampai masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai masalah. Sebagai contoh nyata misalnya kasus “ijazah palsu atau asli Jokowi”. Selama masyarakat menganggapnya suatu masalah, maka terus-menerus akan dipermasalahkan. Masalahnya akan selesai dengan sendirinya ketika masyarakat sudah menganggapnya bukan masalah.

Di sisi lain, pendekatan konflik melihat masalah sosial terjadi karena terjadi ke-tidak-adilan dalam pembagian kekuasaan (politik-ekonomi) dan dalam alokasi sumber-daya. Terjadi eksploitasi sebagian (besar) warga masyarakat oleh sebagian (kecil) lainnya yang memegang kekuasaan dan sumber-daya. Penyelesaian masalah hanya bisa dicapai jika konflik diselesaikan, yang berarti bisa saja melalui revolusi dan perebutan kekuasaan.

Pertanyaan 3/3:

*Jelaskan perbedaan penyebab masalah sosial.*

Jawaban 3/3:

Pada umumnya sosiolog melihat penyebab masalah sosial bersifat sangat rumit, tidak hanya disebabkan oleh satu-dua penyebab, melainkan merupakan kombinasi, akumulasi dan komplikasi dari berbagai sebab yang berkelindan dan bertaut satu dengan yang lain (Ref. [2 (e)]). Dalam (Ref. [1] Modul 05, hal. 5.16– 5.29) diuraikan berbagai penyebab masalah sosial, mulai dari faktor struktural dan faktor kultural, bisa berasal dari individu – karena masalah kesehatan mental, misalnya - mau pun institusional akibat tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial, atau karena penyebab-penyebab yang sistemik, yang intinya bahwa masalah sosial itu terjadi karena sistem sosial itu terdiri dari manusia yang merupakan makhluk sosial, menjadi sumber masalah, karena manusia melakukan kegiatan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomis, biologis, psikologis, mau un kebutuhan kultural. Ambil contoh misalnya masalah premanisme. Premanisme menjadi masalah sosial akhir-akhir ini karena para preman itu manusia. Olehnya itu, untuk memberantas premanisme, ada pemikiran untuk mengganti preman manusia dengan robot (disebut *Preman-Bot*) berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence, AI*) yang bukan manusia sehingga tidak lagi berpotensi untuk melakukan tindak premanisme.

Secara umum, akar penyebab masalah sosial bisa merupakan kombinasi, komplikasi dan akumulasi dari berbagai faktor, antara lain misalnya: faktor politik, faktor legal perundang-undangan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor struktural, faktor kesejarahan, faktor perilaku – baik perilaku individu mau pun kelompok - dan faktor perkembangan teknologi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya perbedaan masalah sosial perjudian yang disebabkan oleh faktor perilaku dengan perjudian yang disebabkan oleh faktor perkembangan teknologi. Perjudian yang menjadi masalah sosial – seperti yang terjadi di Lampung baru-baru ini sampai mengakibatkan tertembak matinya beberapa anggota polisi – adalah perjudian dalam bentuk sabung ayam. Ini murni penyebabnya adalah perilaku beberapa oknum, yang bisa di-gerebeg, ditangkap, disita peralatannya, diajukan ke pengadilan, lalu pelakunya dihukum sesuai pasal-pasal pidana yang berlaku. Tapi perjudian yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, dalam bentuk “judol” atau *judi on-line*, misalnya, masalah sosial yang ditimbulkannya menjadi sangat rumit, sehingga sangat sulit mencari solusinya.

## REFERENSI

- [1] **Partini, et.al.**, “*Masalah-Masalah Sosial*”, **Modul 1 – 9, SOSI4401**, Edisi 5 Cetakan Kedua [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Google Search**, Dari Aplikasi Penelusuran, <https://www.google.com/>, diperoleh referensi rujukan sebagai berikut:
  - (a) **Konblum, William & Joseph Julian**, [2011], “*Social Problems*”, 14<sup>th</sup> ed..
  - (b) **Best, Joel**, [2016], “*Social Problems*”, 3<sup>rd</sup> ed.
  - (c) **Rubington, Earl & Martin S. Weinberg**, [2010], “*The Study of Social Problems: Seven Perspectives*”, 7<sup>th</sup> ed..
  - (d) **C. Wright Mills**, [1959], “*The Sociological Imagination*”.
  - (e) **Giddens, Anthony**, [2021], “*Socio;ogy*”. 10<sup>th</sup> ed.